



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN



Rencana Kerja (Renja) 2026

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN**
KABUPATEN BANGKALAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Ach. Siddik, S.AP, MM NIP. 197002052003121004	Plt. Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Ainun Jariyah, S.STP, M.Si NIP. 197901161998102001	Plt. Sekretaris
3.	Sekretaris	Nurul Farida Mariana, STP NIP. 198103152014072002	Pejabat Struktural
	Anggota	Jefry Alvian Riviadi, SE NIP. 198901312020121004	Fungsional
	Anggota	M. Reza Santosa Putra, A.Md, A.Pkt NIP. 199905072022031002	Staf
	Anggota	Fathur Rijal, A.Md NIP. 199210152022031004	Staf
4.	Bidang Koperasi		
	Koordinator	Rusdi Hanzyah, S.Sos NIP. 197212142009031001	Plt. Kepala Bidang
	Anggota	Ahmad Roestamadi F. SE. MM NIP. 196711152007011016	Pejabat Fungsional
	Anggota	Eko Prasetyo, SE. MM NIP. 198103242009031004	Pejabat Fungsional
	Anggota	Rina Roydhotul H. SE NIP. 198206242008012015	Pejabat Fungsional
	Anggota	Rommy Abi Hermawan, SH NIP. 198411062009031001	Pejabat Fungsional
5.	Bidang Pembiayaan		
	Koordinator	Eti Nandari, SE. MM NIP. 197002151990032002	Plt. Kepala Bidang
	Anggota	Erly Mudayanti, SE NIP. 198301232006042013	Pejabat Fungsional
	Anggota	Nuzullah Qurfianto, SE NIP. 197210252006041012	Pejabat Fungsional
	Anggota	Qorry Ainah, SE NIP. 196905042006042011	Pejabat Fungsional
	Anggota	Ach. Israfillian Arif, SE NIP. 198504182009031002	Pejabat Fungsional
6.	Bidang Usaha Mikro		
	Koordinator	Musninah, SH. SAP. MM NIP. 196703272001122002	Plt. Kepala Bidang
	Anggota	Titien Ardianingsih, SE NIP. 197612162007012007	Pejabat Fungsional
	Anggota	Hary Sofianto, SE NIP. 197910182010011008	Pejabat Fungsional
	Anggota	Gumawan Sekti Aji, SE NIP. 198505292003121003	Pejabat Fungsional
	Bidang Perdagangan		
7.	Koordinator	Dhenis Pribadi, SE NIP. 198206122003121003	Plt. Kepala Bidang
	Anggota	Siti Fitriyah, SE. MM NIP. 199707212008012011	Pejabat Fungsional
	Anggota	Trisna Mayang Sari, SE 198501062008012003	Staff
	Bidang Metrologi		
8.	Koordinator	Delly Septiana, SE, MM NIP. 197609102003122005	Plt. Kepala Bidang
	Anggota	Tini Suryanengrum, SE. MM NIP. 198304212010012023	Pejabat Fungsional
	Anggota	Silva Sri Wahyuningsih NIP. 198208312014072004	Staff

Bangkalan, 22 Juli 2025
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO dan Perdagangan
KABUPATEN BANGKALAN

ACH. SIDDIK, S.AP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700205 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kinerja yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja (RENJA) bertujuan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran.

Keberhasilan pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat di ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplmentasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar rencana kerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Bangkalan, 15 Agustus 2025

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKALAN**



ACHMAD SIDDIK, SAP., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700205 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan PD Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	18
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	19
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	23
4.1 Program dan Kegiatan	23
BAB V. PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

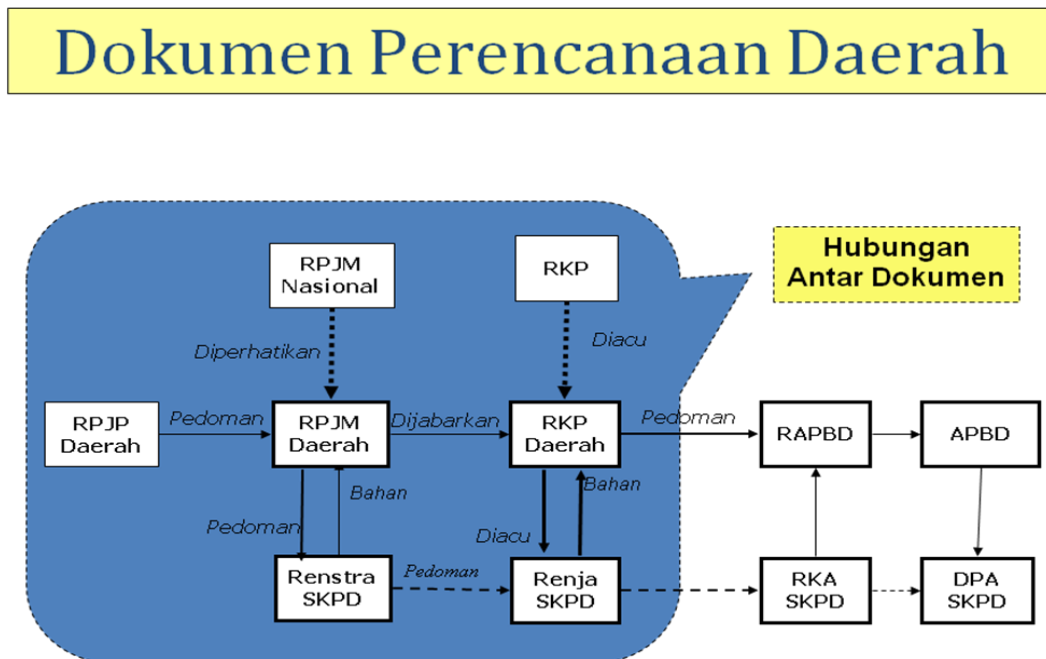
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

Gambar. 1.1.



Sumber : Diadopsi dari Bahan Sosialisasi SPPN (Bappenas)

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1/D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor/.....)

I.3. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja baik

a. Latar Belakang

Memuat tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rancangan Renja

b. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rancangan Renja Kabupaten Bangkalan Tahun 2025.

c. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

d. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja PERANGKAT DAERAH Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

- Tabel 2.1 (Rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun Lalu)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Evaluasi Renstra

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

- Tabel 2.3 (Review terhadap Rancangan RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

- Tabel 2.4 (Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

2. Lampiran – Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan 7 Program yang didalamnya terdapat 11 Kegiatan dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.352.938.111,- dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan 5 Program yang didalamnya terdapat 12 Kegiatan dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.000.644.385,-

Program dan Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Bangkalan**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
11	01	16			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	100%	100%	100%	83,76%	84%	100%	284%	284%
2	17	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	1	1	1	100%	3	5	5,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8	8	8	8	100%	8	24	3,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	7	7	7	7	100%	7	21	3,00
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	1	0	0	0%	1	2	2,00
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	0	0	0%	1	2	2
2	17	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yag digaji/diberi tunjangan	12	12	12	12	100%	12	36	3
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	17	01	2	03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2	2	2	0	0%	2	4	2

2	17	01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	0%	0%	100%	200%	200%
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti keikutsertaan peserta bimtek	20	20	20	0	0%	20	40	2,0
2	17	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	32	32	31	97%	32	95	2,96875
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	1	1	1	0	0%	1	2	2
2	17	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	3	3	3	100%	3	9	4,5
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14	14	14	14	100%	14	42	3
2	17	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	2	2	2	100%	2	6	3
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	3	3	4	2	50%	3	8	2,666666667
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	1	1	1	100%	1	3	3
2	17	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	2	2	2	0	0%	2	4	2
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	14%	13%	14%	18%	130%	14%	45%	323%

2	17	02	2	01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan KSP/USP yang mendapatkan ijin usaha	20	20	10	13	130%	20	53	2,65
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang difasilitasi ijin usahanya	20	20	10	13	130%	20	53	2,65
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas	69%	0	69%	62,1%	90%	69%	131%	190%
2	17	03	2	01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang diperiksa dan diawasi	20	20	20	18	90%	69	107	5,35
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	10	10	10	8	80%	46	64	6,4
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi non simpan pinjam yang mematuhi perundang-undangan	10	10	10	10	100%	23	43	4,3
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	40%	0	40%	36%	90%	40%	76%	190%
2	17	04	2	01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang dinilai kesehatannya	20	0	10	9	90%	40	49	2,45
					Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Nilai Kesehatan	10	10	10	9	90%	25	44	4,4
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi (orang)	94%	60%	94%	94%	100%	94%	248%	264%

2	17	05	2	01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Koperasi yang Dilatih	20	20	20	20	100%	20	60	3
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih	20	20	20	20	100%	20	60	3,00
2	17	05	2	02	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	160	150	0	0	#DIV/0!	160	310	1,9375
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM dan Koperasi yang Dilatih	160	160	0	0	#DIV/0!	160	320	2
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Jumlah Kualitas Usaha Koperasi	55%	40%	55%	41,25%	75%	55%	136%	248%
2	17	06	2	01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina	20	0	20	15	75%	55	70	3,5
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan restrukturisasi usaha/difasilitasi/dibina/diperluas akses pasar dan pembiayaannya	20	20	20	15	75%	20	55	2,75
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang diberdayakan	35%	35%	0%	0%	#DIV/0!	35%	70%	200%
2	17	07	2	01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan UM yang diberdayakan	25	25	0	0	#DIV/0!	35	60	2,4
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	25	25	0	0	#DIV/0!	35	60	2,4
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase UM yang dikembangkan	5%	5%	10%	7,8%	78%	7%	20%	396%

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Untuk bidang koperasi Usaha Mikro, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, merupakan SKPD yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM beserta jajarannya berperan menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar tumbuh dan berkembang dengan baik (pasal 12 ayat 1). Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan koperasi bagi kepentingan anggota (pasal 112 ayat 2). Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian koperasi
- b. Bimbingan usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota
- c. Memperkokoh permodalan dan pembiayaan koperasi

- d. Bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya
- e. Bantuan konsultasi, informasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi

Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor impor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan

Potensi Perdagangan di Kabupaten Bangkalan bergeliat terjadi di kec kota bangkalan. di kecamatan kota Bangkalan terdapat 3 (tiga) simpul pertumbuhan ekonomi dengan di dominasi .sektor perdagangan yang sangat potensial dan dapat di sebut sebagai kawasan segi tiga emas bangkalan

Simpul pertama adalah kelurahan mlajah .di mana terdapat bangkalan plaza dan pasar ki lemah duwur merupakan pusat nya.

Simpul kedua dikelurahan bancaran dengan pasar sebagai pusatnya sementara simpul ketiga terdapat di desa martajesah dengan pesarean syaichona Muhammad cholil (wisata religi) sebagai pusatnya.

Pengembangan ketiga kawasan ini dimasa yang akan datang tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten bangkalan, tanpa meninggalkan pengembangan kawasan sekitar jembatan suramadu di kecamatan labang, kecamatan tragah, dan kecamatan burneh,

Sub sektor perdagangan terpetakan dalam kategori perdagangan besar, menengah dan kecil. Di kabupaten bangkalan dari ketiga kategori perdagangan kecil selalu mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini wajar mengingat aktivitas

perdagangan di bangkalan masih dominan komoditas yang bersifat lokal ,seperti hasil makanan dan minuman olahan pertanian dan kerajinan kecil

Untuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pasar; *Pendapatan Retribusi*, Pendapatan sektor pasar Selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 4.401.759.685 menjadi Rp. 6.753.867.214 tahun 2024 hal ini dipengaruhi adanya kenaikan tarif retribusi pasar.

Capaian kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam arti luas tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan, sebagaimana tabel 2.2 :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Bangkalan**

No	Indikator	SPM/Stand ar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB			0,08	0,1	0,12	-	0,08	0,1	0,12	0,14	
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB			19,52	20	20,5	-	19,52	20	20,5	21	
3	Persentase Usaha Mikro yang memperoleh NIB		√	29,7	30	30,5	-	29,7	30	30,5	31	
4	Pertumbuhan Wirausaha			1,04	1,06	1,08	-	1,04	1,06	1,08	1,1	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			100	100	100	-	100	100	100	100	
6	Nilai SAKIP PD			-	64	64,5	-	-	64	64,5	65	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi dan usaha mikro. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
2. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang koperasi dan usaha mikro
4. Pelaksanaan administrasi bidang koperasi dan usaha mikro
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Mengembangkan koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan informasi dalam penyusunan kebijakan koperasi dan usaha mikro

4. Mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
5. Meningkatkan peran koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.
6. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar perdagangan (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
7. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
8. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan pameran-pameran lainnya
9. Peningkatan informasi perdagangan
10. Peningkatan pelayanan kemetrologian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
11. Penataan Pasar Daerah dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
12. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- b. Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 Program Kegiatan yang dilaksanakan mengalami perubahan sesuai Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020 dan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Bangkalan, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya data mengenai review terhadap rancangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan sebagaimana tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Kabupaten Bangkalan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	36.216.480.084,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Bangkalan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	33.117.911.234,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.000.000,00	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Laporan	1.000.000,00	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Laporan	500.000,00	

f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	1.000.000	
g	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	25.797.367.184,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	24.897.339.034,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Bulan Orang	25.793.982.884	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang	24.895.339.034	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.384.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	1.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100 %	1.500.000,00	

a	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	500.000	
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.000.000	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah yang terlaksana	100 %	1.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah yang terlaksana	100 %	165.000.000,00	
a	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 dokumen	1.000.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 dokumen	165.000.000	Cetak Karcis Pasar
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	114.639.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	59.820.000,00	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.138.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.202.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1.050.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	6.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	6.200.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	14.428.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.000.000	
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang Undangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang Undangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.620.000	

g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 laporan	40.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100% %	1.373.324.820,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100% %	1.500.000.000,00	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	1.373.324.820	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	
b	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	1.500.000.000	Pembebasan Lahan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100% %	8.593.728.180,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	6.395.250.000,00	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	220.753.180	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	474.560.000	
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	8.372.975.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan	5.920.690.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	329.920.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	94.002.200,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	168.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	52.182.200	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	5.000.000	

c	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Aset tetap lainnya yang di pelihara	3 unit	56.820.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Aset tetap lainnya yang di pelihara	3 unit	16.820.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.000.000,00	
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kabupaten Bangkalan	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	2,1 %	10.000.000,00	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kabupaten Bangkalan	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	2,1 %	20.000.000,00	
1	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kantor Cabang yang diterbitkan ijinnya	10 Koperasi	10.000.000,00	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kantor Cabang yang diterbitkan ijinnya	13 Koperasi	20.000.000,00	
a	"Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota"	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Koperasi	10.000.000	"Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota"	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	13 Koperasi	20.000.000	Hibah Dekopinda
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	62 %	25.000.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	62 %	20.000.000,00	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	18 Koperasi	25.000.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	18 Koperasi	20.000.000,00	
a	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18 Koperasi	25.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18 Koperasi	20.000.000	Koperasi Merah Putih

II	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	41 %	10.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	41 %	552.300.000,00	
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Koperasi yang diberdayakan/di- lindungi/dibina	15 Koperasi	10.000.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Koperasi yang diberdayakan/di- lindungi/dibina	15 Koperasi	552.300.000,00	
a	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Koperasi	10.000.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Koperasi	552.300.000	DAK Non Fisik
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE UM YANG BERTRANSFOR- MASI DARI INFORMAL KE FORMAL	8 %	804.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE UM YANG BERTRANSFOR- MASI DARI INFORMAL KE FORMAL	8 %	1.200.000.000,00	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UM yang diberdayakan	35 UM	804.000.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UM yang diberdayakan	35 UM	1.200.000.000,00	
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	35 Orang	804.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	35 Orang	1.200.000.000	Pemberdayaan UMKM (Subsidi Bunga 0%)
II	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kabupaten Bangkalan	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	8 %	300.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kabupaten Bangkalan	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	8 %	110.000.000,00	

1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UM yang dikembangkan	39 UM	300.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kabupaten Bangkalan	Jumlah UM yang dikembangkan	39 UM	110.000.000,00	
a	Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	39 Unit Usaha	300.000.000	Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	39 Unit usaha	110.000.000	ASPI, Stimulan Bagi PKL dan Digitalisasi
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	100 %	1.211.193.450,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERDAGANGAN	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	100 %	976.100.000,00	
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Perentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	100 %	1.191.193.450,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Perentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	100 %	971.100.000,00	
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	400.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	150.000.000	Aspirasi Masyarakat
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit	791.193.450	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit	821.100.000	Operasional Pasar
4	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Bangkalan	Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	100 %	20.000.000,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Bangkalan	Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,00	
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	20.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	5.000.000	
III	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kabupaten Bangkalan	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	25.000.000,00	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kabupaten Bangkalan	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	19.000.000,00	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	20.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100 %	14.000.000,00	

a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	11.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	5.000.000	
b	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	5.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	5.000.000	
c	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	4.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	4.000.000	
2	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bangkalan	Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bangkalan	Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,00	
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 laporan	5.000.000	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kabupaten Bangkalan	Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,00	

1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Persentase Penyelenggara n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.000.000,00	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bangkalan	Persentase Penyelenggara n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.000.000,00	
d	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5.000.000	
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	100 %	20.000.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kabupaten Bangkalan	PRESENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	100 %	25.000.000,00	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kabupaten Bangkalan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	100 %	20.000.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kabupaten Bangkalan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	100 %	25.000.000,00	
a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 unit	20.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bangkalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 unit	25.000.000	Tera Ulang
					38.626.673.534,00					36.045.311.234,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Data mengenai Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Data untuk disajikan, sebagaimana tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

A. Prioritas Pembangunan Nasional (ASTA CITA) :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Generasi Z) dan penyandang disabilitas
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Nawa Bhakti Satya) :

- 1) JATIM SEJAHTERA
- 2) JATIM KERJA
- 3) JATIM AKSES
- 4) JATIM CERDAS
- 5) JATIM SEHAT
- 6) JATIM BERKAH - AMANAH
- 7) JATIM AGRO
- 8) JATIM HARMONI
- 9) JATIM LESTARI

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan (Panca Dharma Prasetya) :

- 1) Bangkalan Berakhlak dan Berdaya Saing
- 2) Bangkalan Sejahtera
- 3) Bangkalan Tumbuh dan Lestari
- 4) Bangkalan Melayani
- 5) Bangkalan Potensial dan Mandiri

Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Kabupaten Bangkalan Mendukung hal tersebut meliputi :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (ASTA CITA)
 - (1) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur
 - (1) Jatim Kerja (Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas)

3. Prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan
 - (1) Bangkalan Melayani (Penyelenggaraan Birokrasi yang Prima, Berkualitas, dan Transparan)

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2026, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029. Tujuan pembuatan renja Tahun 2026 yaitu untuk **“Meningkatkan Kontribusi UMKM Serta Nilai Tambah Perdagangan Dalam Perekonomian”**.

2. Sasaran

Di dalam mewujudkan tujuan dari Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai sasaran yaitu : **Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dan Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha.**

Perumusan tujuan dan sasaran Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan					Sasaran					Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Realisasi	Target		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026	
Meningkatkan Kontribusi UMKM serta Nilai Tambah Perdagangan dalam Perekonomian	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,08	0,1	0,12	Meningkatnya Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase Usaha Mikro yang memperoleh NIB	29,7	30	30,5	
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	19,52	20	20,5	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha	Pertumbuhan Wirausaha	1,04	1,06	1,08	
					Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	100	100	
						Nilai SAKIP PD	-	64	64,5	

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 adalah 10 Program dengan 19 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan di antaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
- **Kegiatan Administrasi Keuangan PD**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD**
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
 - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 Daerah Kab/Kota**
 - a. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

- **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
 - a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha mikro dan kewirausahaan

6. Program Pengembangan UMKM

- **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**
 - a. Pengembangan Usaha Mikro

7. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN

BARANG PENTING

- **Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Barang Penting di Pokok dan Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGEMBANGAN

- **Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

10. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2026 adalah 10 Program dengan 19 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan sifat penyebarannya adalah Kabupaten Bangkalan dan melingkupi di beberapa kecamatan.

Dalam mewujudkan pembangunan Koperasi dan UM yang berkualitas serta layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan dibutuhkan adanya suatu kebijakan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Sasaran tersebut ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Bangkalan

Tahun 2025-2029 serta RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029.

Adapun sasaran strategis program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha koperasi dan usaha mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan informasi dalam penyusunan kebijakan koperasi dan usaha mikro
4. Mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
5. Meningkatkan peran koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.
6. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar perdagangan (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
7. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
8. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan pameran-pameran lainnya
9. Peningkatan informasi perdagangan
10. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
11. Penataan Pasar Daerah dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.

Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar. Secara rinci rencana program dan kegiatan tahun 2026 pada Dinas Koperasi dan usaha mikro Kabupaten Bangkalan dapat diuraikan pada tabel 4.1 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027) :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	33.117.911.234,00	DAU		100%	28.832.118.234,00
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	5.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	7 Laporan	1.000.000,00	DAU		7 Laporan	1.000.000,00
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000,00	DAU		1 Laporan	500.000,00
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000,00	DAU		1 Laporan	500.000,00
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000,00	DAU		1 Laporan	500.000,00
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000,00	DAU		1 Laporan	500.000,00
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000,00	DAU		1 Laporan	500.000,00
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	8 Laporan	1.000.000,00			8 Laporan	1.000.000,00
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000,00	DAU		1 Laporan	500.000,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	24.897.339.034,00	DAU		100%	25.249.996.034,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	350 Orang	24.895.339.034	DAU		350 Orang	25.247.996.034

2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	2.000.000	DAU		1 Laporan	2.000.000
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	1.500.000,00	DAU		100%	1.500.000,00
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	500.000	DAU		1 Laporan	500.000
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2 Laporan	1.000.000	DAU		2 Laporan	1.000.000
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah yang terlaksana	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	165.000.000,00	DAU		100%	165.000.000,00
2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	4 Dokumen	165.000.000	DAU		4 Dokumen	165.000.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	59.820.000,00	DAU		100%	59.820.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	-	-			1 Paket	5.000.000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Paket	5.000.000	DAU		1 Paket	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	-	-			1 Paket	5.000.000
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Paket	6.200.000	DAU		1 Paket	6.200.000
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Paket	7.000.000	DAU		1 Paket	7.000.000
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Dokumen	1.620.000	DAU		1 Dokumen	1.620.000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	32 Laporan	40.000.000	DAU		32 Laporan	30.000.000
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	1.500.000.000			100%	25.000.000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	-	-			3 Laporan	25.000.000

2.17.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Unit	1.500.000.000	DAU		-	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	6.395.250.000,00	DAU		100%	3.230.360.000,00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2 Laporan	474.560.000	DAU		2 Laporan	474.560.000
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	14 Laporan	5.920.690.000	DAU		14 Laporan	2.755.800.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	94.002.200,00	DAU		100%	95.442.200,00
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2 Unit	52.182.200	DAU		2 Unit	53.622.200
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	35 Unit	5.000.000	DAU		35 Unit	5.000.000
2.17.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang di pelihara	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	3 Unit	16.820.000	DAU		3 Unit	16.820.000
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasai Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Unit	20.000.000,00	DAU		1 Unit	20.000.000,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERTUMBUHAN VOLUME USAHA KOPERASI	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2,1%	20.000.000,00	DAU		2,2%	10.000.000,00
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	13 Koperasi	20.000.000,00	DAU		13 Koperasi	10.000.000,00
2.17.02.2.02.0001	"Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota"		Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	13 Koperasi	20.000.000	DAU		13 Koperasi	10.000.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PRESENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	62%	20.000.000,00	DAU		62%	20.000.000,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	18 Koperasi	20.000.000,00	DAU		18 Koperasi	20.000.000,00
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	18 Koperasi	20.000.000	DAU		18 Koperasi	20.000.000

2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PRESENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	41%	552.300.000,00	DAK Non Fisik		41%	579.915.000,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan/dilindungi/dibina	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	15 Koperasi	552.300.000,00	DAK Non Fisik		15 Koperasi	579.915.000,00
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	15 Koperasi	552.300.000	DAK Non Fisik		15 Koperasi	579.915.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PRESENTASE UM YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	8%	1.200.000.000,00	DAU		8%	1.200.000.000,00
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang diberdayakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	35 UM	1.200.000.000,00	DAU		35 UM	1.200.000.000,00
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	35 Orang	1.200.000.000	DAU		35 Orang	1.200.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	8%	110.000.000,00	DAU		8%	110.000.000,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UM yang dikembangkan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	39 Um	110.000.000,00	DAU		39 Um	110.000.000,00
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	39 Unit usaha	110.000.000	DAU		39 Unit usaha	110.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PRESENTASE SARANA PERDAGANGAN YANG DITINGKATKAN KUALITASNYA	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	976.100.000,00	DAU		100%	976.100.000,00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perentase sarana dan Prasarana pasar yang dibangun	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	971.100.000,00	DAU		100%	971.100.000,00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	2 Unit	150.000.000	DAU		2 Unit	150.000.000
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	29 Unit	821.100.000	DAU		29 Unit	821.100.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	5.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	12 Dokumen	5.000.000	DAU		12 Dokumen	5.000.000

3.30.04	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	19.000.000,00	DAU		100%	19.000.000,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	14.000.000,00	DAU		100%	14.000.000,00
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	4.000.000	DAU		1 Laporan	4.000.000
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	5.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan ekspor yang dilaksanakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	5.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	5.000.000,00	DAU		100%	5.000.000,00
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	5 Pelaku usaha	5.000.000	DAU		5 Pelaku usaha	5.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PRESENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	25.000.000,00	DAU		100%	25.000.000,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100%	25.000.000,00	DAU		100%	25.000.000,00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	100 Unit	25.000.000	DAU		100 Unit	25.000.000
					36.045.311.234,00				31.777.133.234,00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kinerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026 telah disusun dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap urusan perkoperasian, perdagangan serta perekonomian daerah.

Dokumen Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan ini juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, jika ketersediaan anggaran tidak cukup memadai, maka perlu dilakukan skala prioritas untuk pelaksanaannya, sehingga program dan kegiatan tersebut tetap berjalan se-optimal mungkin.

Demikian Rencana Kegiatan yang kami rancang melalui beberapa proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung oleh kondisi yang lebih kondusif diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara sistemik, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan Good Governance.

Bangkalan, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Bangkalan



ACHMAD SIDDIK, SAP., MM.

Pembina Tingkat I

Nip. 19700205 200312 1 004

Formulir E.29
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
 RENJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKALAN**

NO	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat daerah	√			
2	Pengelolaan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat	√			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10	Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat daerah	√			
10.a	Menyeleraskan program dan kegiatan Perangkat daerah Propinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif	√			
11	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan perkiraan maju	√			
14	Dokumen renja perangkat daerah yang telah disahkan		√		Dokumen renja PD ditetapkan setelah proses verifikasi yang dilakukan oleh Bapperida

Bangkalan, 25 Juli 2025

**Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
 Kabupaten Bangkalan**


Achmad Syidik, SAP., MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700205 200312 1 004